

KOLABORASI PENTAHelix UPAYA INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM BAAS DI KOTA PEKANBARU

Ramlan Darmansyah¹, Adlin²

^{1,2}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

ramlan.darmansyah0367@student.unri.ac.id, adlin@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

The pentahelix collaboration is an important concept and a strategic step for the rapid reduction of malnutrition cases at the national, local (provincial, district/city), and village levels. The concept of pentahelix collaboration involves cross-sectoral elements that share collective responsibility for implementing intervention programs aimed at optimizing the reduction of stunting cases. The implementation of the BAAS (Foster Father/Mother for Stunted Children) program in Pekanbaru City represents one of the sensitive interventions designed to accelerate stunting reduction, engaging key stakeholders such as the Pekanbaru City Government, the private sector, higher education institutions, professional organizations, community institutions, and the media. The purpose of this study is to explore the pentahelix collaboration in intervention efforts to accelerate stunting reduction, focusing on the implementation of the BAAS program in Pekanbaru City. This research adopts a qualitative approach, with data collected through a literature review. The findings indicate that the pentahelix collaboration as an effort to accelerate the reduction of malnutrition cases in Pekanbaru City involves the local government, universities, private companies, professional organizations, community institutions, and the media. The stunting reduction interventions implemented consist of both specific and sensitive approaches. The BAAS program serves as a sensitive intervention an indirect effort to reduce stunting cases by providing basic necessities and nutritional support to children affected by stunting.

Keywords : *Stunted children, Stunting intervention, Pentahelix collaboration, BAAS program*

ABSTRAK

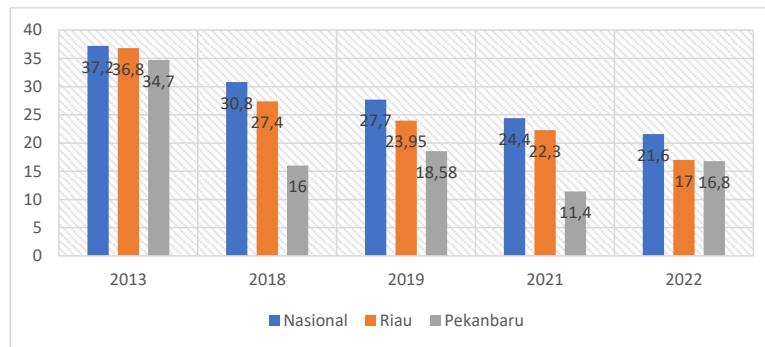
Kolaborasi pentahelix merupakan suatu konsep penting sebagai langkah strategis sebagai aksi cepat untuk penyusutan angka kasus gizi buruk, baik di tingkat nasional, lokal (provinsi,kabupaten/kota) maupun desa. Konsep kolaborasi pentahelix melibatkan seluruh

elemen lintas sektor yang memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan program intervensi optimalisasi penyusutan angka kasus stunting. Implementasi dari program BAAS atau Bapak/Bunda asuh anak yang mengalami stunting di Kota Pekanbaru merupakan salah satu bentuk intervensi sensitif dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru, dengan melibatkan seluruh elemen terutama Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga kemasyarakatan dan media. Tujuan dalam penelitian ini yaitu melacak kolaborasi pentahelix upaya intervensi percepatan penurunan stunting tinjauan terhadap implementasi dari program BAAS atau Bapak/Bunda Asuh Anak yang mengalami Stunting di Kota Pekanbaru. Adapun metode penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang perolehan datanya melalui tinjauan pustaka. Adapun hasil pembahasan dalam penulisan ini bahwa kolaborasi pentahelix sebagai upaya percepatan penyusutan kasus gizi buruk di Kota Pekanbaru melibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi profesi, lembaga masyarakat dan media. Adapun intervensi upaya percepatan stunting telah dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Pelaksanaan kegiatan Bapak/Bunda Asuh Anak yang mengalami Stunting di Kota Pekanbaru merupakan salah satu intervensi sensitif yaitu intervensi secara tidak langsung untuk menekan angka kasus stunting dengan memberikan bantuan bahan pokok dan pemenuhan gizi untuk anak terdampak stunting.

Kata Kunci: *Anak terdampak stunting, Intervensi stunting, Kolaborasi Pentahelix, Program BAAS*

PENDAHULUAN

Stunting menjadi salah satu persoalan dan tantangan yang serius dalam bidang kesehatan di Indonesia, khususnya di kalangan anak-anak. Kondisi stunting dapat diidentifikasi melalui tinggi badan anak yang di bawah standar usia mereka, sebagai akibat dari malnutrisi kronis selama masa pertumbuhan anak. Dampak buruk dari stunting dapat menyebabkan gizi buruk, gangguan fisik, gangguan mental serta kesehatan bagi anak (Lestari, 2023). Stunting dapat muncul dan terdeteksi pada periode 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan anak, yang umumnya disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu lama atau kondisi gizi kronis (Haskas, 2020). Gizi kronis ataupun stunting tidak semata-mata memengaruhi pertumbuhan fisik anak, melainkan juga kemampuan berpikir dan produktivitas mereka di kemudian hari, sehingga dapat menghalangi perkembangan generasi dan kualitas sumber daya manusia nasional (Mitra, 2015). Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa jumlah kasus stunting yang dialami oleh anak balita/bayi di Indonesia mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan dan buruk, yaitu sebesar 24,4% pada tahun 2021 (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, 2023). Meski tingkat tersebut telah berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaiannya tetap jauh dari sasaran yang ditetapkan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), World Health Organization (WHO) mengharuskan angka prevalensi stunting turun hingga di bawah 20% pada tahun 2030 (Rahmadhita, 2020). Pada tahun 2024 secara nasional Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa angka kasus prevalensi stunting turun hingga 14% (Dian Mira Anjani & Sri Nurhayati, 2024). Sehingga tingkat penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia secara nasional ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan target yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO).



Sumber Data: Dokumen Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022

Gambar 1. Angka Kasus Stunting Tingkat Nasional, Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar grafik diatas yang merupakan data prevalensi stunting di tingkat nasional, Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang dikutip melalui Dokumen Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, menjelaskan bahwa penurunan angka kasus gizi buruk di tingkat Kota Pekanbaru mengalami penurunan yang signifikan (warna abu-abu), di tahun 2019 kasus stunting di Kota Pekanbaru yaitu 18,58%(persen), sedangkan di tahun 2021 angka kasus gizi buruk mengalami penurunan kasus 11,4%(persen) dan 2022 kasus stunting di Kota Pekanbaru mengalami penurunan menjadi 16,8%(persen) (Munira, 2023). Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 penurunan angka kasus stunting di Indonesia dapat diupayakan menjadi 14% (Novrizaldi, 2023). Upaya penurunan angka kasus stunting yang signifikan dapat melibatkan seluruh aspek kepentingan, baik ditingkat nasional maupun daerah.

Salah satu kota di Indonesia yang masih bergulat dengan tingginya angka stunting adalah Kota Pekanbaru. Seperti halnya daerah lain, tantangan utama yang dihadapi dalam menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru melibatkan berbagai faktor multidimensional, seperti keterbatasan akses terhadap gizi yang memadai, rendahnya edukasi kesehatan, serta pengaruh sosial-ekonomi (Suri & Meiwanda, 2023). Upaya untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan masalah ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, namun juga membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh lapisan elemen. Permasalahan stunting di Kota Pekanbaru dapat diidentifikasi melalui edukasi kepada masyarakat di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Kota Pekanbaru.

Untuk merespon tantangan tersebut, muncul pendekatan pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama, kolaborasi pentahelix merupakan konsep dari kolaborasi yang menyatukan sumber daya untuk mencapai satu tujuan yang terdiri dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media (Priambudi, 2022). kolaborasi di antara kelima komponen ini dianggap penting dalam mempercepat upaya penurunan angka stunting di Kota Pekanbaru, penerapan pendekatan pentahelix diwujudkan melalui program Bapak/Bunda Asuh Stunting Kota Pekanbaru (Yandera, 2024). Program Bapak/Bunda Asuh Stunting di Kota Pekanbaru adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk menjembatani berbagai aktor dalam rangka mendukung intervensi gizi pada anak-anak yang rentan stunting.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait upaya-upaya dan strategi percepatan penurunan stunting, pada Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan bahwa dalam upaya-upaya strategi percepatan penurunan stunting, dapat melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok masyarakat, tokoh dan organisasi kemasyarakatan, akademisi (perguruan tinggi), organisasi profesi, media massa, dunia usaha (perusahaan), tokoh

agama dan mitra pembangunan, serta unsur Pemerintah (baik tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dan mencegah tumbuhnya angka dan kasus stunting, baik ditingkat nasional maupun lokal/daerah, dapat dilaksanakan oleh seluruh kelompok kepentingan terutama pemerintah melalui kegiatan intervensi. Intervensi dalam upaya pencegahan gizi buruk dapat dilakukan melalui intervensi spesifik yaitu control terhadap balita (Maulana et al., 2022). Selain itu intervensi dalam pencegahan stunting juga dapat dilaksanakan dengan cara intervensi sensitif dari luar bidang kesehatan yaitu melalui program terkait pencegahan stunting(Rambe & Khairani Nasution, 2022). Penjelasan terkait intervensi pencegahan stunting lebih lanjut, menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, bahwa intervensi terdiri dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menekan angka penurunan stunting yaitu melalui program BAAS atau Bapak/Bunda Asuh Anak yang terdampak Stunting. Program BAAS merupakan bentuk dari upaya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan seluruh unsur kepentingan untuk mencegah kenaikan angka kasus stunting. Namun demikian, program Bapak/Bunda Asuh Stunting di Kota Pekanbaru mengalami beberapa tantangan dalam penerapan di lapangan, salah satunya adalah koordinasi yang belum optimal dan belum terlibatnya secara aktif unsur pentahelix di Kota Pekanbaru. Selain itu, terdapat permasalahan terkait partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal edukasi mengenai stunting dan pentingnya peran keluarga dalam mencegah malnutrisi. Rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di kalangan keluarga kurang mampu, masih menjadi kendala yang menghambat percepatan penurunan angka stunting di Pekanbaru. Maka untuk itu, penting adanya kolaborasi pentahelix, yang mana pentingnya dukungan seluruh peran kelompok kepentingan yang ada di Kota Pekanbaru dan media menjadi krusial dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penanganan stunting.

Kolaborasi antara unsur pentahelix dalam program Bapak/Bunda Asuh Stunting di Kota Pekanbaru, telah menunjukkan beberapa kemajuan. Namun, upaya percepatan penurunan angka stunting masih membutuhkan sinergi yang lebih optimal di antara seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong keterlibatan berbagai pihak, serta memastikan setiap bentuk intervensi tepat sasaran.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian terhadap implementasi program Bapak/Bunda Asuh Anak yang terdampak Stunting di Kota Pekanbaru, guna mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana kolaborasi pentahelix dapat diperkuat untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting. Kajian ini akan memberikan gambaran

mengenai efektivitas program dan memberikan pandangan yang tepat untuk inovasi di masa mendatang, dengan harapan bahwa angka stunting di Kota Pekanbaru dapat ditekan secara signifikan.

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, adapun rumusan masalah pada penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan kolaborasi pentahelix upaya intervensi percepatan penurunan stunting melalui implementasi program BAAS di Kota Pekanbaru?, kemudian adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melacak dan mengetahui kolaborasi pentahelix upaya intervensi percepatan penurunan stunting melalui implementasi program BAAS di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik metode penelitian kualitatif, melalui studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data melalui sumber-sumber keperpustakaan atau dalam bentuk dokumen, seperti sumber seperti buku, dokumen laporan, jurnal, dan riset-riset terdahulu (Adlini et al., 2022). Penulisan karya ilmiah ini menggunakan studi literatur dengan pertimbangan bahwa data-data yang digunakan dapat dihasilkan melalui jurnal-jurnal ilmiah, laporan dokumen instansi yang menyediakan data-data stunting dan program-program stunting. Selain melalui jurnal dan dokumen, sumber data juga dapat diperoleh melalui media sosial dan website instansi yang menyediakan data-data stunting.

Setelah diperoleh data melalui kepustakaan, dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dan kemudian ditarik simpulan berupa deskripsi. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan dan fokus terhadap analisis data yang telah diperoleh untuk kemudian disimpulkan secara deskripsi mendalam.

Tahap dari metode penelitian kualitatif studi kepustakaan yaitu melalui, 1. Mengumpulkan sumber-sumber data dan bahan kepustakaan (dokumen primer ataupun skunder), 2. Melakukan klasifikasi data sesuai dengan formula penelitian, 3. Pengolahan data, 4. Pengutipan referensi, 5. Penampilan data, 6. Abstraksi, 7. Analisis data dan 8. Mengambil kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Adapun data yang dimanfaatkan dalam karya ilmiah ini yaitu jurnal, berita media massa/sosial, dokumen pendukung instansi terkait kajian dan peraturan perundang-undangan, fokus lokasi dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu Kota Pekanbaru pada tahun 2023-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi

Untuk menjelaskan secara konseptual tentang kolaborasi maka diadopsi melalui penjelasan terkait collaborative governance yang menempatkan kolaborasi sebagai paradigma baru dalam tata kelola kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor (Nasrulhaq, 2020). Kolaborasi ditandai oleh adanya hubungan yang bersifat formal, terbuka, aktif, serta melibatkan pengambilan keputusan secara bersama. Menurut (Nasrulhaq, 2020) tata kelola kolaboratif berlandaskan pada empat nilai utama, yaitu orientasi pada konsensus, kepemimpinan yang bersifat kolektif, komunikasi yang berlangsung secara multiarah, serta pembagian sumber daya. Keempat prinsip ini membentuk satu kesatuan proses yang menyatukan tujuan, struktur kelembagaan, interaksi sosial, dan tindakan dalam setiap tahap penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Tata kelola kolaboratif muncul sebagai pendekatan yang penting dalam sektor publik untuk menghadapi kompleksitas dan saling ketergantungan antar isu kebijakan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Model ini menyoroti pentingnya keterlibatan sektor publik, swasta, dan masyarakat secara lintas sektor dalam proses pengambilan keputusan yang terstruktur, partisipatif, dan berorientasi pada konsensus.(Nurhayati & Rahman, 2023)

Menurut Ansell dan Gash terkait kerangka kerja dan model kolaborasi terdiri dari empat elemen tahapan yaitu: 1. *Starting condition* yaitu kondisi awal Dimana indikator pengurukurnya Adalah ketidak seimbangan antar sumber daya atau kemampuan dari pemangku kepentingan yang berbeda, 2. *Facilitative leadership* yaitu kepemimpinan yang mampu mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif, 3. *Institutional design* yaitu desain institusional dengan adanya aturan yang jelas dan konsistens, 4. *Collaborative process* yaitu proses kolaborasi yang terdapat dialog tatap muka dan komitmen antara para pemangku kepentingan (Muhammad Noor & Falih Suaed, 2022). Keempat indikator kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash tersebut menjadi satu kesatuan proses yang menyatukan tujuan, struktur, interaksi, dan aksi dalam setiap tahap kebijakan publik, menjadikan kolaborasi sebagai fondasi penting dalam praktik kebijakan pemerintahan saat ini.

Pentahelix

Model *pentahelix* merupakan konsep yang diadopsi dari *Collaborative governance*, yaitu suatu pengaturan yang memungkinkan pemerintah sebagai pelaksana dan lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-lembaga negara, dengan tujuan untuk mengambil keputusan secara bersama-sama dan melaksanakan keputusan tersebut (Firdaus & Cahyani, 2023). *pentahelix* adalah model penyusunan dari elemen-elemen penting dalam upaya menyelesaikan suatu persoalan, elemen-elemen dalam model *pentahelix* terdiri dari elemen

pemerintah (lembaga publik), elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), elemen sektor swasta, elemen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dan elemen Masyarakat Madani (Hermawan & Astuti, 2021). Model *pentahelix* merupakan salah satu konsep dalam pemecahan masalah yang berbasis aktor, dengan melibatkan lima unsur kelompok kepentingan yaitu akademisi dalam hal ini termasuk Perguruan Tinggi, dunia bisni atau Perusahaan, komunitas masyarakat, pemerintah (baik nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota), dan media sebagai sosialisasi.



Sumber: Analisis

Gambar 2. Model *Pentahelix*

Berdasarkan analisis diatas, bahwa model *Pentahelix* dapat dilihat sebagai lima kelompok kelembagaan yang berbeda-beda tugas dan fungsinya, yang memiliki hubungan kuat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik dengan perencanaan bersama dan menyatukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama.

Kolaborasi Pentahelix Upaya Optimalisasi Penurunan Angka Kasus Stunting Kota Pekanbaru

Upaya untuk mendukung optimalisasi penurunan stunting di Kota Pekanbaru memerlukan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, baik sektor pemerintahan, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat. Percepatan penurunan stunting Kota Pekanbaru, dapat di upayakan melalui kegiatan-kegiatan intervensi yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Pekanbaru, yang didasarkan pada Surat Keputusan yang ditetapkan Walikota Pekanbaru Nomor 347 tentang Perubahan Ke-I atas Surat Keputusan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Nomor 548 T.A 2022 Tentang Satuan Tugas Optimalisasi Penurunan kasus Stunting Kota Pekanbaru. Upaya percepatan penurunan stunting oleh Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, melakukan aksi integritas dan

sosialisasi terkait intervensi penurunan stunting terintegritas kepada pemangku kepentingan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Pekanbaru Nomor 347 tentang Perubahan Ke-I atas Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 548 T.A 2022 Tentang Kelompok Tim Percepatan dan Optimalisasi Penurunan Angka Kasus Stunting Kota Pekanbaru, dapat dianalisis bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Pekanbaru melibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Dinas dibidang kesehatan, bidang sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat dan Dinas/Badan terkait. Selain itu dalam bidang pelayanan intervensi melibatkan organisasi profesi yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Pekanbaru, Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekanbaru, Persatuan Ahli Gizi dan lainnya. Selain itu dalam bidang data, pemantauan dan manajemen pengetahuan melibatkan perguruan tinggi/ lembaga akademisi yaitu Stikes Hang Tuah, STIFAR, Poltekkes Kemenkes dan Riau Universitas Riau.

Adapun keterlibatan dari pihak media dan dunia usaha/ perusahaan tidak terlihat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Pekanbaru. Akan tetapi, keterlibatan media dan dunia usaha / perusahaan secara langsung sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi stunting di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil kutipan dari media bahwa Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program intervensi stunting salah satunya kegiatan Bapak Asuh Stunting pihak perusahaan-perusahaan telah terlibat aktif dalam memberi bantuan melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggung Jawab Sosial (Redaksi, 2023). Keterlibatan pihak dunia usaha/ perusahaan dapat dilihat secara langsung dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru dengan memberikan bantuan-bantuan sosial.

Selain keterlibatan dunia usaha/perusahaan, keterlibatan media massa sangat diperlukan dalam hal sosialisasi dan komunikasi informasi terkait percepatan penurunan kasus stunting di Kota Pekanbaru. Keterlibatan media dapat dilihat melalui saluran-saluran media massa berita online, baik media independent maupun media yang di kelola Pemerintah Kota Pekanbaru.

1. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru

Melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Nomor 347 tentang Perubahan Ke-I atas Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 548 T.A 2022, Tentang Satuan Tugas Optimalisasi Penurunan kasus Stunting Kota Pekanbaru, bahwa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru di pimpin oleh kepala daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru. Adapun pelaksana penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru terdiri dari Sekretaris Daerah Kota

Pekanbaru, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.

Penyelenggaraan dalam konteks intervensi penurunan stunting terintegritas di tingkat Kabupaten/Kota tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi tertentu, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor, maka dari pada itu, diperlukan tim lintas sektor dari berbagai bidang dan instansi (Sardjoko, 2018). Peran Pemerintah Kota Pekanbaru melibatkan Kepala Daerah Kota Pekanbaru dan seluruh Perangkar Daerah Kota Pekanbaru dengan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting didukung oleh beberapa bidang utama, yakni Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif, Bidang Perubahan Perilaku serta Pendampingan Keluarga, Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi, dan Manajemen Pengetahuan.

Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi penurunan stunting terdiri dari : 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, 2) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, 4) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, 5) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, 7) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi, 8) Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, 9) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (HBS), 10) Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder Mitra Kerja, 11) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, 12) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, 13) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, 14) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan kegiatan lainnya terkait intervensi dan pencegahan stunting di Kota Pekanbaru.

Adapun penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan yang terkait program intervensi penurunan stunting, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru yang telah dianggarkan pada instansi atau perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan program intervensi penurunan stunting.

2. Peran Organisasi Profesi

Keterlibatan secara aktif dari peran organisasi profesi bidang kesehatan dalam pelaksanaan program intervensi percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Seperti halnya

Profesi Bidang Gizi, Profesi Bidang Kesehatan dan Profesi Kedokteran. Peranan profesi kedokteran dan profesi ahli gizi sangat berpengaruh dalam mencapai target pelaksanaan intervensi spesifik yang merupakan intervensi secara langsung untuk mencegah terjadinya stunting secara langsung oleh bidang kesehatan.

Keterlibatan secara langsung organisasi profesi sebagai kelompok Tim Percepatan dan Optimalisasi Penurunan Kasus Stunting Kota Pekanbaru, pada bidang intervensi secara spesifik dan intervensi secara sensitif melibatkan Ikatan Dokter Indonesia Kota Pekanbaru, Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekanbaru dan Persatuan Ahli Gizi Kota Pekanbaru.

3. Peran Akademisi/Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 347 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 548 Tahun Tentang Kelompok Tim Percepatan dan Optimalisasi Penurunan Angka Kasus Stunting Kota Pekanbaru, dalam Bidang Koordinasi dan Konvergensi, Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan, melibatkan Perguruan Tinggi/ Lembaga Akademisi yaitu Kepala LPM Sekolah Tinggi Kesehatan Hang Tuah, Sekolah Tinggi Farmasi, Politeknik Kesehatan Kementeria Kesehatan Riau dan Universitas Riau.

Program percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru juga melibatkan akademisi dari universitas setempat, yang berperan dalam melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program. Riset-riset terkait gizi, pola hidup sehat, serta dampak sosial-ekonomi dari stunting menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Akan tetapi, hasil penelitian sering kali hanya formalitas dan belum dioptimalkan dalam proses penyusunan kebijakan publik, sehingga perlu adanya upaya yang lebih kuat untuk menjembatani antara dunia akademik dan pemerintah dalam penanganan stunting.

4. Peran Dunia Usaha/Perusahaan

Sektor swasta dalam konteks *pentahelix* juga diharapkan dapat berperan lebih aktif. Hingga saat ini, keterlibatan sektor swasta sering kali hanya terbatas pada pemberian bantuan material, sementara peran mereka dalam edukasi, penyediaan layanan kesehatan, dan upaya preventif lainnya masih minim. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terarah dan berkelanjutan.

Adapun peran dunia usaha/perusahaan dalam pelaksanaan program intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru, dapat dilihat melalui beberapa media. Melalui rapat bersama Pemerintah Kota Pekanbaru

melibatkan perusahaan swasta yang ada di Kota Pekanbaru, untuk dapat terlibat aktif dalam memberi bantuan asupan gizi kepada anak terdampak stunting di wilayah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru melalui dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). (Suarapekanbaru.com, 2023)

5. Peran Media Massa

Peran media massa dan media sosial juga semakin penting dalam memobilisasi dukungan publik untuk program percepatan penurunan stunting. Media memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai stunting dan mendidik mereka tentang cara-cara pencegahan. Selain itu, media juga dapat memberikan tekanan positif kepada pemerintah dan sektor swasta agar lebih aktif terlibat dalam upaya penanganan stunting.

Keterlibatan media massa dan media sosial untuk mendukung program percepatan stunting di Kota Pekanbaru, dapat dilihat melalui penyampaian informasi dan sosialisasi terkait program-program yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan gizi buruk kronis yang ada di Pekanbaru dan edukasi percepatan penurunan stunting. Adapun keterlibatan peran media massa dapat dilihat dari beberapa media massa independent dan media sosial Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut:



Sumber: (Zainuddin, 2021)



Sumber : (suarapekanbaru.com, 2022)

Gambar 3 . Informasi Media Terkait Sosialisasi Stunting

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa, media massa independent yang ada di Kota Pekanbaru, berperan dalam memberikan informasi dan sosialisasi terkait program-program pencegahan stunting kepada masyarakat kota pekanbaru melalui media online. Selain media massa independent, Pemerintah Kota Pekanbaru juga memanfaatkan media sosial instansi perangkat daerah sebagai media sosialisasi pencegahan stunting.



Sumber : (<https://www.pekanbaru.go.id/>, 2024)

Gambar 4 . Infromasi Media Pemerintah Kota Pekanbaru Cegah Stunting

6. Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pelaksanaan program percepatan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab dan melibatkan instansi atau kelembagaan-kelembagaan formal, peran serta kemasyarakatan atau Lembaga Kemasyarakatan/Organisasi Kemasyarakatan menjadi unsur penting untuk mendukung keberhasilan program percepatan stunting. Keterlibatan peran serta Lembaga Kemasyarakatan/Oragnisasi Kemasyarakatan secara langsung dan aktif dapat berpengaruh pada lingkungan sosial masyarakat.

Pokok persoalan stunting secara langsung adalah peran serta keluarga dalam menyediakan lingkungan untuk memberikan pengasuhan dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak yang baik. Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Kader Posyandu di Kota Pekanbaru berperan penting dalam memberikan pendampingan, pendidikan, bimbingan, dan konseling kepada keluarga yang membutuhkan (Bunyamin, 2024). Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan Lemabaga Kemasyarakatan yang berada di setiap wilayah Kelurahan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Posyandu merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang berperan aktif dalam melaksanakan program-program pendampingan keluarga yang membutuhkan terutama program pencegahan kasus stunting.

Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Pekanbaru

Intervensi

Intervensi dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang melibatkan pelaku relasi dalam merencanakan proses perbaikan yang didasarkan pada masalah-masalah yang ditemukan dalam proses pelaksanaan. Menurut (Kholisah et al., 2024) intervensi dapat diklasifikasikan berdasarkan sasaran dan target sebagai berikut:

1. Intervensi dilakukan dalam proses yang melibatkan aspek-aspek manusia dalam organisasi, seperti komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta kepemimpinan.
2. Intervensi Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bentuk intervensi yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan potensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi.
3. Intervensi lembaga teknis yaitu tentang produktivitas dan efektivitas organisasi.
4. Strategi Intervensi mencakup strategi organisasi, struktur, dan budayadan lingkungan organisasi yang luas.

Intervensi merupakan sutau program yang dibentuk oleh suatu organisasi untuk membantu organisasi yang dimaksud dengan tujuan membantu dalam efektivitas penyelesaian masalah yang dihadapi. Intervensi dapat dilakukan baik secara langsung maupun intervensi secara tidak langsung.

Berdasarkan penjelasan yang dikutip dari (Sumarni, 2013) bahwa intervensi dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai organisasi publik secara langsung melalui aksi-aksi program, selain itu pemerintah juga dapat melakukan intervensi secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan strategis.

Dalam pencegahan penurunan angka kasus stunting pemerintah mengeluarkan kebijakan intervensi yang terdiri dari 2 intervensi yaitu spesifik dan sensitif. Dalam konteks ini, intervensi spesifik berarti memperbaiki status gizi dengan menyasar empat kelompok utama yakni remaja putri, ibu hamil, anak usia bayi dan balita, serta masyarakat umum (Pratiwi, 2023). Sedangkan intervensi sensitif yaitu seluruh kegiatan penyediaan yang bertujuan untuk mendukung perbaikan gizi dan kesehatan (Domili et al., 2023). Upaya intervensi percepatan penurunan stunting didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang terdiri dari intervensi spesifik yaitu intervensi langsung untuk mengatasi sebab-sebab stunting, selanjutnya intervensi sensitif yaitu intervensi secara tidak langsung untuk mengatasi sebab-sebab stunting.

Intervensi Spesifik

Intervensi spesifik merupakan salah satu program kesehatan untuk menekan kasus stunting secara langsung baik ditingkat nasional, daerah provinsi kabupaten/kota maupun tingkat desa. Intervensi spesifik secara langsung diamanatkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait upaya-upaya dan strategi percepatan penurunan stunting.

Adapun pelaksanaan intervensi spesifik sebagai percepatan penurunan kasus gizi buruk kronis (stunting) di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan, sebagai bentuk kegiatan-kegiatan untuk mengatasi secara langsung terjadinya gizi buruk kronis maka dilaksanakanlah kegiatan dalam lingkup bidang perbaikan gizi, kesehatan dan nutrisi.

NO	INTERVENSI	TARGET %	RATA-RATA CAKUPAN INTERVENSI (SKALA KAB/KOTA)
1	Remaja perempuan yang rutin mengonsumsi suplemen Tablet Tambah Darah (TTD)	58	55,14 %
2	Pasangan yang akan menikah atau calon ibu yang telah diberikan Tablet Tambah Darah (TTD)	90	44 %
3	Pasangan usia subur (PUS) yang menjalani pemeriksaan kesehatan dalam rangka pelayanan pra-nikah	90	44,49 %

4	Ibu hamil dengan status KEK yang diberikan dukungan asupan gizi extra	90	100 %
5	Proporsi ibu hamil yang mengonsumsi minimal 90 tablet TTD selama kehamilan	80	47,61 %
6	Tingkat kebutuhan KB yang belum terlayani	7,4	17,96 %
7	Remaja perempuan sebagai konsumen Tablet Tambah Darah (TTD)	58	55,14 %
8	Pasangan yang akan menikah atau calon ibu yang telah menerima suplemen Tablet Tambah Darah (TTD)	90	44 %
9	Pasangan usia subur (PUS) yang menjalani pemeriksaan kesehatan dalam rangka layanan pra-nikah	90	44,49 %
10	Ibu hamil yang mengalami KEK dan mendapatkan suplai asupan gizi tambahan	90	100 %
11	Bagian dari ibu hamil yang memenuhi konsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80	47,61 %
12	Proporsi layanan keluarga berencana yang belum terpenuhi terhadap kebutuhan pasangan usia subur	7,4	17,96 %
13	Keluarga rentan stunting yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan konsumsi gizi.	50	0,14 %
14	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Program Keluarga Harapan (PKH) yang turut serta dalam sesi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) menggunakan modul khusus mengenai kesehatan dan gizi	90	100 %

Sumber Data: Dokumen Disdalduk KB Kota Pekanbaru

Tabel 1. Layanan Intervensi Gizi Spesifik 2023

Berdasarkan tabel yang diwarnai dengan warna kuning diatas dapat dianalisis bahwa, pelaksanaan terkait intervensi spesifik yang merupakan kegiatan dibidang kesehatan yang secara langsung untuk mengatasi penyebab

terjadinya stunting di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan menurut target dan rata-rata capaian intervensi.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat ditarik simpulan bahwa masih terdapat beberapa capaian yang menjadi perhatian dan terus untuk diupayakan salah satunya adalah Rumah tangga rentan stunting yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan pekarangan guna memperbaiki asupan gizi dengan target 50% dan capain target 0,14%.

Intervensi Sensitif

Upaya percepatan stunting dengan melakukan intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab stunting secara langsung menjadi sangat penting. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program percepatan penurunan kasus stunting secara tidak langsung atau intervensi sensitif juga menjadi salah satu faktor penting dalam pencegahan stunting. Intervensi sensitif merupakan kegiatan atau program yang dilakukan untuk mengatasi penyebab stunting secara tidak langsung melalui kebijakan program yang terintegrasi.

Pelaksanaan intervensi sensitif dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru, dapat dilihat melalui kebijakan dan program terintegritas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan melibatkan seluruh sektor (Akademisi, Swasta, Media dan Lembaga Kemasyarakatan). Adapun beberapa kebijakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Pekanbaru dan peran serta aktor kelembagaan lainnya di Kota Pekanbaru sebagai upaya percepatan stunting melalui intervensi sensitif yaitu Launching Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), Celengan Remaja Peduli Stunting yang merupakan inisiatif Satgas Remaja Peduli Stunting, Dapur Sehat Atasi Stanting (DAHSAT) Kampung KB, Mini Lokakarya yang dilaksanakan di kecamatan guna mengevaluasi pelaksanaan upaya optimalisasi penurunan kasus stunting di wilayah Kecamatan se-Kota Pekanbaru, dan Audit Kasus Stunting melibatkan Tim terdiri dari dokter spesialis anak, spesialis obgyn, ahli gizi dan psikolog untuk menganalisa kasus stunting pada sasaran.

Stunting

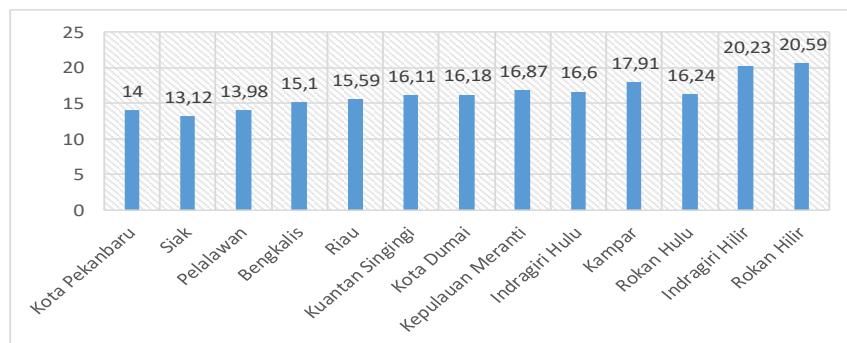
Stunting merupakan permasalahan dalam bidang kesehatan yang dapat beresiko pada perkembangan otak , pertumbuhan anak dan bahkan menyebabkan kematian. Resiko stunting seringkali dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang, stunting merupakan kegagalan pertumbuhan yang diakibatkan tidak tercukupinya nutrisi/gizi mulai dari sejak awal kehidupan (Pratiwi Yunus et al., 2021). Sebagai permasalahan serius dalam bidang kesehatan yang menyebabkan dan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan generasi secara nasional, permasalahan stunting menjadi prioritas bagi kebijakan baik nasional maupun lokal. Upaya pencegahan dan

percepatan penurunan angka stunting baik secara nasional maupun lokal pentingnya peran kerja sama seluruh aktor (Muslimah & Widjaja, 2022). Kolaborasi yang efektif antara sektor pemerintahan dan nonpemerintahan menjadi hal penting dalam penerapan intervensi yang terpadu dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya stunting.

Kegiatan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kota Pekanbaru

Program BAAS atau Bapak/Bunda Asuh Anak yang mengalami Stunting merupakan strategi kolaboratif yang melibatkan individu maupun lembaga dari sektor swasta, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat atau disebut dengan peran serta *pentahelix*. Peran serta seluruh kelompok yang terlibat dalam program Bapak/Bunda Asuh Stunting sebagai bentuk wujud dukungan dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak yang terancam stunting.

Program ini tidak hanya menyediakan dukungan material seperti penyediaan makanan bergizi dan suplemen, namun juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi serta perawatan kesehatan yang optimal bagi anak-anak mereka. Dalam pelaksanaannya, program ini dipantau oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bekerja sama dengan lembaga kesehatan setempat untuk memastikan intervensi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang signifikan.



Sumber Data: Dokumen Disdalduk KB Kota Pekanbaru

Gambar 5. Target Prevalensi Penurunan Stunting Provinsi Riau Tahun 2023 Berdasarkan Kabupaten dan Kota

Berdasarkan gambar diatas terkait target prevalensi angka kasus stunting atau anak penderita gizi buruk kronis di Kabupaten atau Kota Provinsi Riau pada tahun 2023, dapat diperhatikan bahwa target pengurangan angka penderita gizi buruk kronis atau stunting di Kota Pekanbaru pada tahun 2023, ditargetkan yaitu 14%, target angka penurunan stunting di Kota

Pekanbaru telah memenuhi standar target nasional yang menargetkan angka kasus stunting di tingkat nasional yaitu 14%. Upaya intervensi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama pihak bidang kesehatan, Perusahaan Swasta, Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru, dan institusi yang berperan dalam penurunan kasus stunting di Kota Pekanbaru, dapat dinilai berhasil mencapai target rata-rata penurunan angka stunting.

Program intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi terkait, perlu untuk ditinjau dan dikaji lebih lanjut terkait program pelaksanaan intervensi stunting secara langsung yaitu Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Penting untuk memperhatikan keterlibatan seluruh peran serta aktor secara aktif untuk menekan kasus penderita gizi buruk kronis atau kasus stunting yang ada di wilayah Kota Pekanbaru secara berkelanjutan.

No	Kecamatan	Jumlah Anak Resiko Stunting
1	Senapelan	2
2	Tuah Madani	13
3	Pekanbaru Kota	5
4	Bukit Raya	15
5	Kulim	9
6	Sail	10
7	Rumbai Timur	4
8	Tenayan Raya	59
9	Lima Puluh	41
10	Marpoyan Damai	18
11	Payung Sekaki	5
12	Sukajadi	9
13	Bina Widya	8
14	Rumbai Barat	28
15	Rumbai	17
Total		243

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Disdalduk KB Kota Pekanbaru, Juni 2023

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Balitas Stunting di Kota Pekanbaru Per-Kecamatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperhatikan bahwa permasalahan kasus anak resiko stunting di Kota Pekanbaru berdasarkan Wilayah Kecamatan masih dikategorikan tinggi, dengan rata-rata total keseluruhan yaitu 243 kasus anak resiko stunting di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun untuk mencapai target agar penurunan kasus resiko stunting di wilayah Kota Pekanbaru saat ini, tidak hanya menjadi tanggung

jawab Pemerintah Kota Pekanbaru, melainkan melibatkan dukungan seluruh peran serta kelompok aktor baik Lembaga Kemasyarakatan, Swasta, Perguruan Tinggi dan instansi lainnya.

Dengan adanya program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, yang melibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan seluruh elemen dalam hal ini Tim optimalisasi penurunan kasus stunting Kota Pekanbaru melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Nomor 347 tentang Perubahan Ke-1, atas Surat Keputusan yang dikeluarkan Walikota Pekanbaru Nomor 548 Tahun 2022, untuk melaksanakan intervensi sensitif yaitu intervensi yang secara tidak langsung mencegah kasus stunting melalui program dan kebijakan pencegahan dan penurunan kasus stunting, salah satunya program Bapak/Asuh Stunting.

Selanjutnya berdasarkan surat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru Nomor 005/TPPS PKU/VI/2024/17 Tahun 2024 Tentang Permintaan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting bahwa pelaksanaan bantuan makanan sesuai Standar Ahli Gizi diberikan selama 6 bulan berturut-turut setiap bulan, adapun bahan makanan dimaksud yaitu Susu, Beras, Telur, Kacang Hijau, Minyak Goreng, Multivitamin dan lain-lain, adapun kegiatan dimaksud berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru serta Fasilitator Kecamatan Setempat. Adapun yang berperan dalam memberikan bantuan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting Kota Pekanbaru yaitu seluruh organisasi perangkat daerah baik Dinas, Badan, Rumah Sakit dan Kecamatan se-Kota Pekanbaru.

Impelemtasi program BAAS atau Bapak/Bunda Asuh Anak yang mengalami kasus Stunting di Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh peran serta aktor lintas sektor yaitu peran serta Pemerintah Kota Pekanbaru (Disdalduk KB, Camat se-Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan lainnya), Perusahaan dan Swasat (PT.Pegadaian, DPC AKU Pekanbaru, Pertamina Hulu Rokan, PT. Sumatera Riang Lestari), Perguruan Tinggi (Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara), Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia, PKBI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dan Forum Kooordinasi Daerah Kota Pekanbaru.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan program BAAS atau Bapak/Bunda Asuh Anak yang mengalami kasus Stunting, yaitu melakukan intervensi secara tidak langsung melalui pemberian bantuan penuhan kebutuhan gizi kepada anak/balita berpotensi stunting yang ada di Wilayah Kecamatan Kota Pekanbaru. Keberhasilan program BAAS atau Bapak/Bunda Asuh Anak yang mengalami kasus Stunting di Kota Pekanbaru dilihat dari capaian program yaitu sebanyak 33 balita pada tahun 2023 terhindar dari kasus stunting.

Berdasarkan Surat Penetapan Walikota Pekanbaru Nomor 400.5/DisdaldukKB/146/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bapak/Bunda

Asuh Stunting Tahun 2024, berdasarkan tindak lanjut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 bahwa Kota Pekanbaru pada tahun 2024 tercatat 221 anak balita dan anak usia dua tahun terdampak kasus stunting. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti program Bapak/Bunda Asuh Stunting untuk melakukan intervensi kembali terkait percepatan dan pencegahan kasus stunting pada balita terdampak. Adapun instansi atau sektor yang berperan dalam pelaksanaan program ini yaitu terdiri dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Baznas, Rumah Sakit Swasta dan upaya BUMN (PLN). (<https://suarapekanbaru.com/>, 2024)

Keberhasilan program dapat dilihat dari hasil progres/keberhasilan program tersebut, keberhasilan dari hasil program Bapak/Bunda Asuh Stunting di Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui penurunan angka kasus stunting yang ada di Kota Pekanbaru. Meskipun secara tidak langsung program Bapak/Bunda Asuh Stunting merupakan salah satu intervensi yang dilakukan secara tidak langsung untuk menekan kasus stunting di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil deskripsi dan penjabaran pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa peran kolaborasi *pentahelix* sebagai upaya percepatan penurunan stunting menjadi sangat penting, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan melibatkan sektor dan elemen-elemen yang ada dalam rangka percepatan penurunan stunting. Peran serta kolaborasi *pentahelix* dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru telah melibatkan seluruh unsur kelompok instansi baik formal maupun non-formal, Pemerintah, pihak swasta (perusahaan), pihak organisasi profesi, Kelompok Lembaga Kemasyarakatan dan Media. Keterlibatan peran serta kolaborasi *pentahelix* dalam percepatan penurunan stunting didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait upaya-upaya dan strategi percepatan penurunan stunting. Namun pada pelaksanaannya kolaborasi *pentahelix* dalam rangka upaya percepatan stunting belum terlihat maksimal, keterlibatan media yang masih belum berdampak langsung dalam mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting masih perlu ditinjau lebih lanjut. Selain itu, keterlibatan pihak swasta / perusahaan dengan memberikan bantuan sosial atau CSR masih terlihat sebagai formalitas bantuan. Peran serta Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi paling dominan dalam konsep kolaborasi *pentahelix* dalam upaya percepatan stunting di Kota Pekanbaru.

Adapun intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting, baik intervensi gizi spesifik dalam ruang lingkup kesehatan secara langsung, maupun intervensi sensitif dengan kebijakan dan program penurunan stunting secara tidak langsung, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan seluruh unsur elemen baik lembaga formal, swasta maupun

masyarakat. Intervensi gizi spesifik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pekanbaru melalui bidang kesehatan yaitu pemenuhan kebutuhan gizi secara langsung dan nutrisi. Akan tetapi dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik masih terdapat beberapa program yang belum mencapai target dan penting untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut. Selain itu, intervensi sensitif yang telah dilaksanakan oleh seluruh elemen lintas sektor terutama Pemerintah Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik, akan tetapi keterlibatan seluruh aktor diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan program Bapak/Bunda Asuh Stunting merupakan salah satu program intervensi sensitif yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru dengan melibatkan seluruh elemen baik internal maupun lintas sektor. Program Bapak/Bunda Asuh Stunting adalah intervensi secara tidak langsung kepada balita atau anak terdampak stunting melalui bantuan bahan pokok dan pemenuhan gizi oleh Tim Penurunan Percepatan Stunting Kota Pekanbaru dan pihak fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, K. K. (2023, Januari 25). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Retrieved September 26, 2024, from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Bunyamin, B. (2024, Januari 29). *Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Penurunan Stunting*. Retrieved Oktober 03, 2024, from [https://www.cakaplah.com/berita/baca/106834/2024/01/29/peran-tim-pendamping-keluarga-dalam-penurunan-stunting#s\(hash.rEtTLJOT.dpbs](https://www.cakaplah.com/berita/baca/106834/2024/01/29/peran-tim-pendamping-keluarga-dalam-penurunan-stunting#s(hash.rEtTLJOT.dpbs)
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library*, 27–36. https://doi.org/10.1142/9789819814664_0002
- Dian Mira Anjani & Sri Nurhayati, I. (2024). PENERAPAN PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP BANJARSARI METRO UTARA. *Jurnal Cendikia Muda*, 4(1), 62–69. <https://doi.org/10.1358/dof.1985.010.01.66960>
- Domili, I., Anasiru, M. A., Napu, A., Zakaria, R., & Mustafa, Y. (2023). Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Spesifik Dan Sensitif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(6), 5778. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.19181>
- Firdaus, N. M., & Cahyani, A. S. N. (2023). Model Penta Helix Dalam Pemberdayaan Desa Digital Di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. *Jurnal Comm-Edu*, 5492, 87–91. <http://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/17151%0Ahttp://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/viewFile/17151/4352>
- Haskas, Y. (2020). Gambaran Stunting Di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 15(2), 2302–2531.
- Hermawan, S., & Astuti, W. (2021). The Penta Helix Model Utilization as Integrative Action for Combating Marine Plastic Litter in Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 237–261.
- https://suarapekanbaru.com/. (2024, Agustus 17). <https://suarapekanbaru.com/news/detail/8846/cegah-stunting-pemko-pekanbaru-kembali-laksanakan-program-bapak-asuh.> Retrieved

- Oktober 04, 2024, from <https://suarapekanbaru.com/>: <https://suarapekanbaru.com/news/detail/8846/cegah-stunting-pemko-pekanbaru-kembali-laksanakan-program-bapak-asuh>
- <https://www.pekanbaru.go.id/>. (2024, Agustus 20). *Pamflet Cegah Stunting Kota Pekanbaru*. Retrieved Oktober 03, 2024, from <https://www.pekanbaru.go.id/>: <https://www.pekanbaru.go.id/p/galeri/foto/>
- Kholidah, N., Hayadi, H., Yusuf, F. A., Iskandar, D., & Toyibah. (2024). Pendekatan Teoritis Intervensi Perubahan, Memilih Intervensi Yang Sesuai. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 1–7.
- Lestari, T. R. . (2023). Stunting Di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XV(14), 21–25. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XV-14-II-P3DI-Juli-2023-196.pdf
- Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 136–144. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.1>
- Mitra. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). *Jurnal Kesehatan Global*, 2(6). <https://doi.org/10.33085/jkg.v1i3.3952>
- Muhammad Noor, Falih Suaed, A. M. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. CV. Bildung Nusantara. https://repository.unair.ac.id/126355/1/4_Collaborative_Governance_ebook.pdf
- Munira, S. L. (2023, Februari 03). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Retrieved Oktober 01, 2024, from https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531_MATERI_KABKP_K_SOS_SSGI.pdf
- Muslimah, R. H., & Widjaja, G. (2022). Kebijakan dan Peran Lintas Sektor Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Stunting Pada Anak Di Kota Bekasi. *Cross-Border*, 5(1), 308–321.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). Systematic Literature Review: Tata Kelola Kolaboratif Dalam Sektor Publik. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.9207>
- Pratiwi, I. G. (2023). Studi Literatur: Intervensi Spesifik Penanganan Stunting. *Indonesian Health Issue*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.43>

- Pratiwi Yunus, Septiyanti, & Rahman. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Stunting di Puskesmas Antang Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 2(5), 898–907. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i5.297>
- Priambudi, R. (2022). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 19(September), 332–337. <https://journal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/43208>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Stunting Problems and Prevention. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Rambe, N., & Khairani Nasution, L. (2022). Analisis Implementasi Program Intervensi Gizi Spesifik Dan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting Pada Balita Di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi*, 5(1), 164–169. <https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG>
- Redaksi. (2023, Mei 19). *Upaya Penanganan Stunting di Pekanbaru Dapat Apresiasi dari Menko PMK*. Retrieved Oktober 02, 2024, from <https://setdako.pekanbaru.go.id/web/detailberita/989/upaya-penanganan-stunting-di-pekanbaru-dapat-apresiasi-dari-menko-pmk#>
- Sardjoko, S. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Retrieved from <file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman%20Pelaksanaan%20Intervensi%20Penurunan%20Stunting%20Terintegrasi%20Di%20Kabupaten%20Kota.pdf>
- Suri, F. A., & Meiwanda, G. (2023). Implementasi Program Gizi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Stunting Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8303918>
- suarapekanbaru.com. (2022, Desember 13). *Cegah Stunting, Orang Tua di Pekanbaru Diimbau Bawa Anak Rutin ke Posyandu*. Retrieved Oktober 03, 2024, from [https://suarapekanbaru.com/news/cetak/5816/cegah-stunting-orang-tua-di-pekanbaru-diimbau-bawa-anak-rutin-ke-posyandu](https://suarapekanbaru.com:https://suarapekanbaru.com/news/cetak/5816/cegah-stunting-orang-tua-di-pekanbaru-diimbau-bawa-anak-rutin-ke-posyandu)
- Suarapekanbaru.com. (2023, Agustus 18). *Pj Walikota Pekanbaru Harapkan Ada Perusahaan Bantu Persoalan Stunting*. Retrieved Oktober 02, 2024, from [https://suarapekanbaru.com/news/detail/6991/pj-walikota-pekanbaru-harapkan-ada-perusahaan-bantu-persoalan-stunting](https://suarapekanbaru.com:https://suarapekanbaru.com/news/detail/6991/pj-walikota-pekanbaru-harapkan-ada-perusahaan-bantu-persoalan-stunting)
- Sumarni. (2013). "Intervensi Pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Penolakan

- Di Bidang Ekonomi. *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.1(No.2), 183-194. Retrieved from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3581735&val=31064&title=INtervensi%20pemerintah%20antara%20kebutuhan%20dan%20penolakan%20di%20bidang%20ekonomi>
- Yandera, E. (2024, Agustus 22). *Penurunan Angka Stunting di Pekanbaru Terus Berjalan, 'Pencegahannya Lanjut Masuk Tahap II'*. Retrieved September 26, 2024, from <https://riaupagi.com/news/penurunan-angka-stunting-di-pekanbaru-terus-berjalan-pencegahannya-lanjut-masuk-tahap-ii-202408228891/>
- Zainuddin, H. (2021, Maret 02). *Diskes Pekanbaru Gelar Sosialisasi Stunting dengan Lintas Sektor*. Retrieved Oktober 03, 2024, from <https://kiblatriau.com/news/cetak/12376/Daerah/kota-pekanbaru/diskes-pekanbaru-gelar-sosialisasi-stunting-dengan-lintas-sektor%C2%A0>